BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi digital pada era kontemporer telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan instansi pemerintahan. Keakuratan, objektivitas, dan keterbukaan informasi dalam memutuskan suatu kebijakan menjadi faktor krusial yang turut menentukan tingkat efektivitas organisasi, terlebih pada institusi penegak hukum seperti Kepolisian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ariantini et al. (2023), keberadaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berperan sebagai Instrumen yang mengolah data serta menyajikan berbagai infomasi serta opsi solusi bagi para pengambil kebijakan.

Di wilayah Polda Gorontalo, terdapat sebuah program khusus yang memberikan penghargaan kelembagaan kepada para penyidik yang menunjukkan prestasi kerja unggul. Program ini dinamakan pemilihan penyidik terbaik. Adanya pemberian apresiasi semacam ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja, meningkatkan sikap profesional, serta memunculkan persaingan yang sehat di antara para penyidik saat menjalankan tanggung jawab pokok dan fungsi penegakan hukum.

Akan tetapi, kondisi di lapangan mengungkapkan bahwa mekanisme yang berlangsung saat ini untuk menentukan penyidik terbaik masih bersifat tradisional dan sarat dengan bias subjektif. Penetapan siapa yang berhak menerima penghargaan lebih sering didasarkan pada pandangan pribadi atasan atau hubungan personal tertentu, bukan berdasarkan pada catatan kinerja yang terukur dan terdokumentasi secara rapi.

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Diana (2022), di mana proses pemilihan supplier pada bengkel masih dilakukan tanpa metode yang terstruktur sehingga hasil keputusan cenderung tidak objektif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kombinasi metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk pemberian bobot kriteria dan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk proses perankingan mampu menghasilkan rekomendasi pemasok terbaik secara lebih terukur.

Hasil ini sesuai dengan temuan Gani et al. (2023) yang mengungkapkan bahwa metode AHP efektif digunakan dalam proses seleksi tenaga kesehatan, mampu menghasilkan pemeringkatan kandidat yang objektif berbasis data melalui teknik perbandingan berpasangan.

Lebih lanjut, Zahra et al. (2025) juga mengonfirmasi keandalan integrasi kedua metode ini dalam konteks pemilihan karyawan terbaik di lingkungan kecamatan, yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan analisis menggunakan Excel serta tingginya tingkat subjektivitas.

Belum tersedianya sarana pendukung yang memadai untuk memproses penilaian kinerja menjadi akar permasalahan utama di Polda Gorontalo. Hingga saat ini, institusi tidak memiliki perangkat bantu (*tools*) yang mampu mengolah data penyidik secara sistematis, menghitung bobot kriteria dengan konsisten, serta menghasilkan perangkingan kandidat yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses manual yang selama ini berjalan juga menyulitkan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja secara periodik dan terdokumentasi dengan baik.

Melihat kenyataan yang telah dipaparkan tersebut, perlu dilakukan proses desain dan pembuatan suatu SPK yang mampu diterapkan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Astuti et al. (2025), Dalam metode SAW, proses kerjanya dimulai dengan menormalisasi nilai dari setiap alternatif yang ada. Setelah itu, angka dari proses normalisasi kemudian dikalikan dengan bobot setiap kriteria, lalu seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Proses ini pada akhirnya menghasilkan sebuah skor preferensi. Alternatif yang memperoleh skor tertinggi akan dipilih sebagai opsi terbaik. Wicaksono et al. (2025) juga mengukuhkan bahwa sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan Kombinasi antara AHP dan SAW terbukti dapat menghasilkan usulan yang tidak memihak, teratur, serta dapat dihitung secara jelas berdasarkan patokan-patokan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sasaran untuk melakukan perancangan sekaligus pengembangan sebuah SPK yang dapat memfasilitasi para pimpinan dalam proses seleksi penyidik terbaik secara lebih tidak memihak, teratur, dan terbuka. Dengan demikian, keputusan akhir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademis maupun kelembagaan.

Berdasarkan uraian kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Reward Penyidik Terbaik di Polda Gorontalo"**. Pemilihan topik ini dilandasi oleh kebutuhan mendesak akan sebuah sistem yang mampu meningkatkan kualitas proses penilaian, mereduksi unsur subjektivitas, serta mendukung terwujudnya transparansi dalam pemberian reward kepada para penyidik di lingkungan Polda Gorontalo. Dengan adanya sistem pendukung keputusan yang dirancang, proses penentuan penyidik terbaik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan objektif, sehingga mampu meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan pemberian reward penyidik terbaik berbasis web di Ditresnarkoba Polda Gorontalo?
2. Bagaimana menerapkan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan penyidik terbaik secara objektif dan terukur?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas ke ranah yang tidak relevan, maka diberikan Batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Gorontalo, dengan objek penilaian adalah penyidik yang bertugas di unit tersebut.
2. Sistem yang dibangun memiliki dua jenis pengguna, yaitu *Admin* dan Penilai. *Admin* bertugas mengelola data penyidik, data kriteria, serta menginput data kinerja Elektronik Manajemen Penyidik (EMP) dan Jumlah Kasus Diselesaikan (P21). Penilai bertugas memberikan penilaian terhadap kriteria Disiplin, Integritas, dan Kerja Sama Tim.
3. Sistem ini dibangun dengan menggunakan PHP *Framework CodeIgniter* 4 dan *database MySQL*.

4. Metode yang diterapkan adalah AHP untuk pembobotan kriteria dan SAW untuk perangkingan.
5. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima kriteria, yaitu Elektronik Manajemen Penyidik (EMP), Jumlah Kasus Diselesaikan (P21), Disiplin, Integritas, dan Kerja Sama Tim. Kriteria Elektronik Manajemen Penyidik (EMP) dan Jumlah Kasus Diselesaikan (P21) menggunakan data kinerja aktual yang diperoleh dari instansi, sedangkan kriteria Disiplin, Integritas, dan Kerja Sama Tim diperoleh melalui penilaian oleh penilai.
6. Hasil akhir penelitian berupa sistem yang siap digunakan dan rekomendasi penyidik terbaik berdasarkan data yang di*input*kan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebgai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemberian *reward* penyidik terbaik di Polda Gorontalo yang siap digunakan dalam proses penilaian.
2. Mengimplementasikan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan bobot kriteria penilaian penyidik secara objektif.
3. Mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk melakukan perhitungan dan perankingan penyidik.
4. Menghasilkan sistem yang mampu membantu pimpinan dalam menentukan penyidik terbaik secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk berbagai pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Polda Gorontalo

Membantu pimpinan dalam menentukan penyidik terbaik secara objektif dan transparan, meningkatkan efetivitas serta efisiensi dalam proses penilaian, mengurangi tinkgat subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan kinerja dan professionalisme penyidik.

2. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman dalam merancang dan mengimplentasikan Sistem Pendukung Keputusan dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di instansi kepolisian.